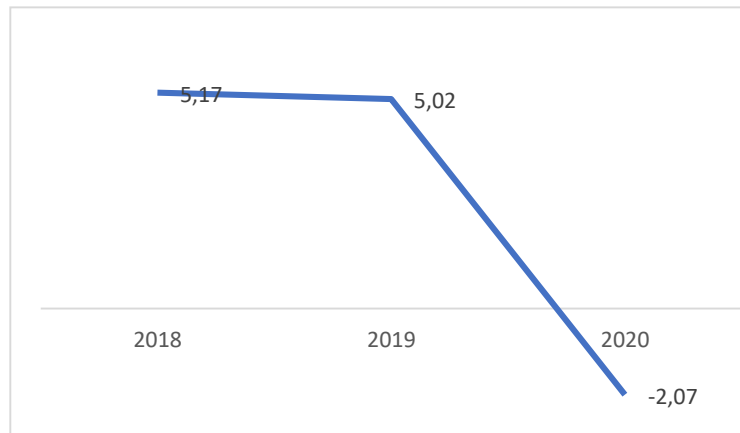


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur ekonomi Indonesia terdapat komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian, struktur ekonomi suatu negara dicerminkan oleh kontribusi sektoral didalam pendapatan nasional. Indikator dari sebuah proses pembangunan ekonomi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun regional (daerah) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan melalui efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan multiplier effect yang besar terhadap sektor-sektor lainnya dan perekonomian secara keseluruhan (Andayani, 2021), berikut ini adalah 5 distribusi terbesar terhadap PDB nasional tahun 2018-2020 berdasarkan lapangan usaha sebagai berikut:



Gambar 1.1 Grafik PDB Nasional Tahun 2019-2020 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan gambar grafik 1.1 distribusi sektor pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2020 menurut Badan Pusat Statistik perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun, pada tahun 2020 mencapai Rp15.434,2 triliun (BPS). Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar

2,07 persen dibandingkan tahun 2019, Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen berkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang berkontraksi sebesar 14,71 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,15 persen (BPS, 2020).

Laju pertumbuhan ekonomi suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Salah satu indikator tingkat kemajuan perekonomian di suatu wilayah adalah dalam ukuran Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata yang dicapai masyarakat (Andayani, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia terdapat 34 provinsi yang memberikan kontribusi perekonomian berdasarkan lapangan usaha dari sisi produksi pertumbuhan terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan atas dasar harga berlaku menurut provinsi (Triliun) pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Provinsi	PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Lapangan Usahan Pertanian (Triliun)		
	2020	2021	2022
Aceh	51.547,88	55.611,32	62.311,54
Sumatera Utara	173.074,95	189.491,36	219.799,22
Sumatera Barat	54.099,28	54.886,62	60.509,91
Riau	222.760,81	244.862,11	244.862,11
Jambi	63.563,09	73.232,41	83.574,86
Sumatera Selatan	68.961,23	72.602,28	78.261,41
Bengkulu	20.782,22	22.532,99	24.951,08

Lampung	104.967,38	105.267,64	115.542,35
Kep. Bangka Belitung	15.443,74	16.887,33	18.287,20
Kep. Riau	8.047,27	8.461,83	9.225,89
Dki Jakarta	2.237,38	2.376,22	2.528,27
Jawa Barat	192.111,63	188.594,03	207.716,66
Jawa Tengah	192.606,66	196.812,57	211.244,85
Di Yogyakarta	14.056,68	14.592,65	16.517,99
Jawa Timur	273.246,09	281.839,00	303.292,05
Banten	38.998,27	40.199,75	44.050,68
Bali	33.832,18	34.767,44	35.989,29
Nusa Tenggara Barat	30.976,84	31.932,66	33.568,41
Nusa Tenggara Timur	30.355,59	32.339,08	35.136,32
Kalimantan Barat	44.735,13	49.220,07	53.976,00
Kalimantan Tengah	33.053,91	37.558,89	40.919,60
Kalimantan Selatan	25.799,22	26.863,44	28.635,33
Kalimantan Timur	53.455,32	59.089,40	64.891,73
Kalimantan Utara	16.535,73	18.085,25	19.507,49
Sulawesi Utara	28.448,83	30.080,42	32.820,28
Sulawesi Tengah	42.961,69	46.500,06	51.206,64
Sulawesi Selatan	109.460,08	122.930,64	133.718,14
Sulawesi Tenggara	31.395,38	32.915,91	36.917,13
Gorontalo	16.188,20	17.085,46	18.073,68
Sulawesi Barat	19.950,57	22.161,87	23.891,84
Maluku	11.103,06	11.280,68	12.651,15
Maluku Utara	8.896,17	9.431,00	10.132,52
Papua Barat	9.067,57	9.341,54	9.538,66
Papua	24.456,60	25.514,22	27.044,54

**Tabel 1.1 PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Usahan
Pertanian Provinsi (Triliun)**

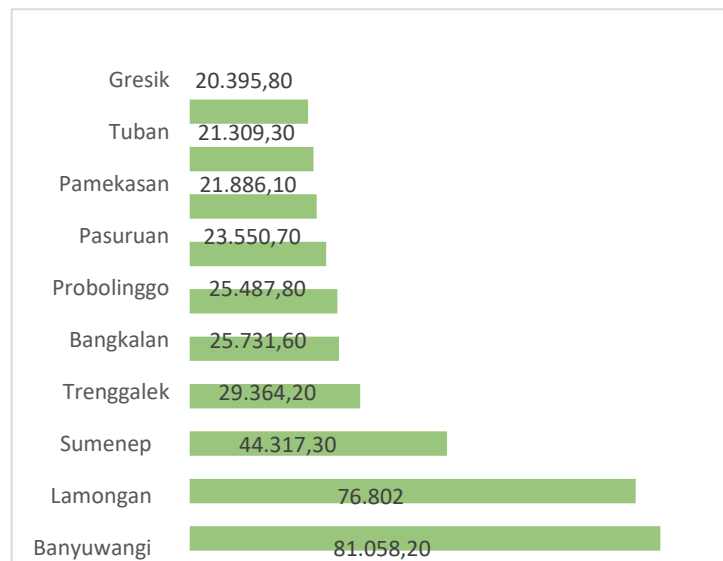
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Menurut tabel 1.1 beberapa provinsi di Indonesia memiliki status lumbung pangan nasional seperti dari sektor pertanian. Sektor ini juga berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Jawa Timur merupakan salah satu wilayah berstatus lumbung pangan nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan PDRB sektor pertanian Jawa Timur sebesar Rp281.839,00 triliun pada 2021. Nilai tersebut terbesar dibandingkan dengan PDRB sektor pertanian 33 provinsi lainnya. Provinsi dengan PDRB pertanian terbesar berikutnya adalah Riau, yakni mencapai Rp 244.862,11 triliun pada tahun lalu. Diikuti Jawa Tengah dengan PDRB pertanian sebesar Rp 196.812,57 triliun, Sumatera Utara sebesar

Rp 189.491,36 triliun, Jawa Barat sebesar Rp 188.594,03 triliun. PDB sektor pertanian nasional mencapai Rp2,25 kuadriliun pada 2021. Nilai tersebut persentasenya mencapai 13,38% dari total PDB Indonesia yang sebesar Rp16,97 kuadriliun.

Sektor pertanian memiliki peran dalam perekonomian yang dianggap sebagai penunjang dari sektor perekonomian lainnya. Negara-negara maju, dalam pembangunan ekonomi diperlukan transformasi struktural ekonomi seperti apabila sebelumnya sektor pertanian menjadi sektor utama dalam kegiatan perekonomian, kini bergeser pada sektor industri modern. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga berperan dalam penyediaan bahan baku bagi sektor industri yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan PDRB. Sektor perikanan yang terdiri dari subsektor perikanan laut dan subsektor perikanan darat (on-farm) dan pengolahan ikan (off-farm) mempunyai peran yang berbeda dalam memacu pembangunan ekonomi wilayah di Jawa Timur (Sofianti, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik Jumlah produksi perikanan tangkap di Jawa Timur tahun 2020 yaitu sebesar 424.251 ton dengan jumlah terbanyak yaitu perikanan laut sebanyak 416.073 ton. Sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 1.264.159 ton dengan jumlah terbanyak adalah budidaya rumput laut sebesar 687.692 ton.

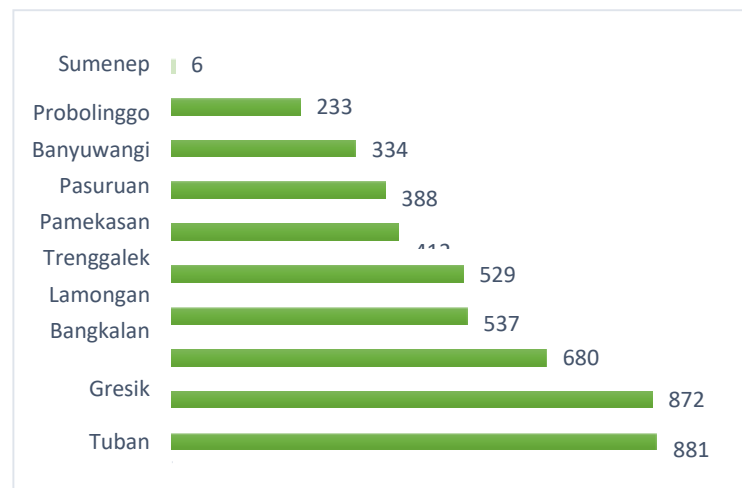
Masyarakat Jawa Timur bermata pencaharian sebagai nelayan merupakan sumber pangan dan sebagai penyedia lapangan kerja (Kusdiantoro, 2019). Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Luas wilayah di Jawa Timur 47.799,75 Km^2 terdapat 38 Kabupaten/Kota, Panjang Garis Pantai 3.498,12 Km^2 dan Luas Perairan Laut 126.672 km. Jumlah masyarakat bekerja sebagai nelayan yaitu 241.737 orang, hasil sektor perikanan yang diperoleh oleh nelayan sebagian besar masyarakat pesisir yaitu perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menghasilkan produksi perikanan terbesar tahun 2019 menurut statistik Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten/Kota di Jawa Timur

sumber: Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan 2019

Berdasarkan gambar 1.2 terdapat jumlah produks perikanan dari 10 Kabupaten provinsi Jawa Timur. Kabupaten terbesar dalam produksi perikanan tangkap (Ton) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, urutan pertama terdapat pada Kabupaten Banyuwangi, Lamongan, Sumenep, Trenggalek, Bangkalan, Probolinggo, Pasuruan, Pamekasan, Tuban dan Gresik. Produksi perikanan tangkap tertinggi terdapat di kabupaten Banyuwangi yaitu 81.058,20 ton dengan jumlah unit pengolahan ikan berjumlah 334 unit. Jumlah pengolahan kan terbesar terdapat di Kabupaten Tuban dengan jumlah 881 unit. Data terkait jumlah unit pengolahan ikan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Unit Pengolahan Ikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

sumber: Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan 2020

Berdasarkan gambar 1.3 terdapat 9.188 unit ikan pengolah dari keseluruhan Kabupaten dan Kota provinsi Jawa Timur terdapat 10 kabupaten/kota dengan jumlah unit pengolahan ikan (ton) terbesar di Jawa Timur. Jumlah unit tertinggi terdapat di wilayah Kabupaten Tuban, Gresik, Bangkalan, Lamongan, Trenggalek, Pemekasan, Pasuruan, Banyuwang, Probolinggo dan Sumenep.

Hal ini sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya, komponen yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, baik untuk pembangunan tingkat nasional ataupun pembangunan tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), selanjutnya diperjelas dengan undang-undang yang berkaitan dengan perikanan Pasal 41 Nomor 31 Tahun 2004 pemerintah berkewajiban membangun pelabuhan dan pelelangan perikanan antara lain untuk mendukung motorisasi dan modernisasi kapal, penangkap ikan tradisional secara bertahap guna meningkatkan industri perikanan tangkap serta kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan perairan.

Pembangunan yang berkelanjutan melibatkan keputusan penggunaan sumberdaya dengan meningkatkan kualitas hidup warga negara dengan

perubahan sosial dan pemberdayaan dalam mensejahterakan masyarakat yang mencakup kesejahteraan ekonomi, dan sosial. Pembangunan yang berbasis pembangunan berkelanjutan memiliki berbagai unsur dan faktor untuk keberlangsungan proses pembangunan, landasan terpenting pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan hidup serta potensi yang ada di alam dan isinya merupakan pembatas, oleh karena itu, pemeliharaan dan pengelolaan kelestarian lingkungan yang optimal berfungsi untuk mendukung kehidupan saat ini dan masa depan untuk tujuan pembangunan sosial dan ekonomi (Prathama, 2020).

Pemerintah daerah diberi keluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan. Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya sangat potensial untuk dikembangkan, berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu terdapat perairan umum, bioteknologi laut, perairan tawar dan industri pengolahan hasil perikanan. Metode untuk memperluas industri perikanan dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan atau tempat pelelangan ikan yang memadai (Windasai, 2021)

Masyarakat Tuban yang berdomisili di pesisir pantai mengandalkan budidaya perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan sebagai menopang kehidupan (Sukandar, 2016). Menurut dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Laut Jawa bagian utara, terdiri dari 20 Kecamatan dan 5 diantaranya merupakan kecamatan pesisir dengan jumlah desa pesisir sebanyak 41 Desa, panjang garis pantai Kabupaten Tuban yaitu 64,164 Km. Sektor perikanan merupakan salah

satu sektor yang berpotensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi andalan di Kabupaten Tuban karena Kabupaten Tuban memiliki laut yang merupakan sumber perikanan. Usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tuban memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah (Suseno, 2014).

Sebagai daerah yang memiliki potensi kelautan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) membangun tempat pelelangan ikan (TPI) untuk pemberdayaan masyarakat nelayan. Kabupaten Tuban memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu: TPI Bulu, TPI Glondonggede, TPI Palang, TPI Karangagung dan TPI Karangsari yang disebut sebagai plaza ikan Tuban sebagai sentra penjualan produk ikan serta terdapat pelabuhan nusantara (Nurdiani, 2020).

Pembentukan tempat pelelangan ikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan meningkatkan produktivitas nelayan dan meningkatkan kualitas hasil tangkapannya, serta memberikan bantuan terbaik dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pertumbuhan industri perikanan tangkap dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang tersedia saat ini, melalui pembangunan TPI pengelolaan perikanan dengan kualitas dan nilai tambah ikan dapat direalisasikan (Fitri, 2021). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 12 tahun 2015 terdapat tiga fasilitas TPI Kabupaten Tuban yaitu terdapat fasilitas pokok, fungsional dan penunjang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat fasilitas yang ada di TPI Kabupaten Tuban belum memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kondisi pada TPI Bulu terdapat permasalahan yang terjadi yaitu berkaitan dengan pelelangan ikan, fasilitas yang kurang terawat dan terdapat nelayan tidak mematuhi peraturan TPI. TPI Palang dengan fasilitas yang kurang memadai yaitu rusaknya akses jalan menuju ke lokasi pelabuhan,

tengkulak ikan lebih memilih untuk membeli ikan di TPI Brondong yang lebih murah dari pada di TPI Palang . TPI Karangagung fasilitas yang kurang memadai, laporan keuangan yang tidak secara transparan, sedangkan pada TPI Glondonggedhe masih belum terdapat fasilitas penunjang dan fasilitas yang kurang terawat.

Lokasi wilayah TPI kurang strategis sehingga banyak nelayan lebih memilih menjual ikan secara langsung. Salah satu lokasi wilayah TPI yang strategis yaitu Plaza Ikan serta merupakan TPI yang dikembangkan secara modern berlokasi di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Lokasi plaza ikan merupakan wilayah pesisir atau disebut sebagai kampung nelayan dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah penduduk di Kelurahan Karangsari 4.030 jiwa. Sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk tersebut bekerja sebagai nelayan dan 30 persen sisanya bekerja di sektor lain (LkjIP, 2020).

Salah satu pengolahan yang terkenal khususnya di Jawa Timur yaitu olahan perikanan tangkap yang diolah menjadi ikan asap (Bashori, 2020). Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Produk ikan asap kelurahan Karangsari merupakan komoditas andalan dan menjadi dayatarik bagi wisatawan sehingga penting bagi perekonomian daerah, masyarakat nelayan Kelurahan Karangsari memanfaatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Tpi Karangsari yang telah dikembangkan oleh pemerintah sebagai plaza ikan Tuban sebagai sarana dan prasarana mempermudah masyarakat nelayan menjual ikan hasil tangkapan atau sentra penjualan produk ikan (Nurdiani, 2020). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang telah dikemukakan oleh (Suseno, 2014) yaitu usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tuban memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Permasalahan yang terjadi yaitu terdapat masyarakat nelayan merasa bahwa penjualan ikan di plaza berakibat terhadap pendapatan, tidak adanya

aktivitas lelang membuat kondisi plaza ikan sepi akan pembeli. Fasilitas yang memadai sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Bashori, 2020) Plaza ikan dengan fasilitas yang memadai. Akan tetapi, banyak fasilitas yang tidak terawat dan luas bangunan yang ada di Plaza terlalu sempit tidak dapat menampung keseluruhan dari masyarakat yang berkerja sebagai nelayan, Plaza Ikan mealokasikan 30 pedagang ikan asap dan area parkir yang sempit sering mengganggu pengguna jalan lainnya serta kurangnya lahan untuk pembuangan sampah berakibat pada pencemaran lingkungan.

Berdasarkan pernyatan tersebut fungsi adanya TPI untuk mensejahterakan masyarakat nelayan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Peran pemerintah untuk mengatur setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat, peraturan yang telah ditetapkan yaitu dalam rangka menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Tuban sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (Jiuping, 2021). TPI merupakan tempat yang menguntungkan jika manfaat didistribusikan secara adil kepada masyarakat tanpa merugikan atau menguntungkan pihak tertentu, apabila TPI hanya menguntungkan pihak tertentu tidak sesuai dengan fungsinya sebagai sarana dan prasarana untuk mensejahterakan masyarakat, maka TPI sebagai wadah keterpurukan bagi masyarakat nelayan (Mardani, 2018). Terdapat peraturan yang telah ditentukan pemerintah melalui UPT tempat pelelangan ikan di Kabupaten Tuban khususnya bagi masyarakat nelayan untuk memanfaatkan TPI, akan tetapi masih banyaknya masyarakat nelayan yang berada dikawasan TPI lebih memilih untuk menjual hasil tangkapan ikan secara langsung yaitu dipinggir jalan dan pasar tradisional.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah plaza ikan sebagai sentra perdagangan ikan asap di Kabupaten Tuban, penelitian dilakukan oleh Munir (2020). Permasalahan yang dibahas adalah Pesisir merupakan daerah yang sarat akan potensi perikanan. Namun demikian pada dasarnya masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan yang sampai saat ini menjadi fenomena klasik pesisir. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tuban dalam meningkatkan nilai tambah produk ikan adalah mendirikan Plaza ikan. Plaza ikan merupakan tempat pelelangan ikan terpadu yang dikemas secara modern dan mengintegrasikannya dengan penjualan ikan segar, ikan asap dan berbagai olahan ikan. Dengan konsep integrasi tersebut di harapkan meningkatkan perekonomian nelayan Tuban. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan teknik wawancara dan kuisisioner. Hasil dari penelitian 30 responden yang menjawab lokasi mudah dijangkau terdapat 21 responden sangat setuju, 9 responden setuju. Lokasi terjangkau dari jalan umum, 19 responden sangat setuju, 2 responden setuju, 5 responden ragu-ragu, 4 responden tidak setuju, Lokasi dekat dengan bahan baku, 17 responden sangat setuju, 4 responden setuju, 3 responden ragu-ragu, 6 responden tidak setuju. Bisa menaikkan harga, 10 responden sangat setuju, 4 responden setuju, 2 responden ragu-ragu, 5 responden tidak setuju, 5 responden sangat tidak setuju .

Penelitian oleh Bashori (2020) adalah keberadaan plaza ikan sebagai tempat untuk mengakomodasi pedagang ikan asap yang representatif wahana pengenalan produk unggulan dan peningkatan pendapatan penjual ikan asap desa karangsari tuban. Permasalahan yang dibahas adalah luas wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang sangat besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional diarahkan pada pendayagunaan

sumber daya kelautan secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan. Pembangunan sektor perikanan telah memberikan kontribusi penting dalam perekonomian regional dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengaruh plaza ikan terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang ikan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek pedagang ikan asap Desa Karangsari, Kabupaten Tuban. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif MillesHubberman dengan langkah- langkah adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Pengaruh peralihan tempat penjualan ikan asap tuban (2) ikan asap sebagai produk unggulan (3) pendapatan pedagang ikan asap.

Penelitian oleh Suprpti (2022) yaitu Manajemen Plaza Ikan Tuban dalam Upaya Mendorong Pedagang Ikan untuk Meningkatkan Omset Penjualan. Permasalahan yang dibahas Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Manajemen Plaza Ikan mendorong pedagang ikan untuk meningkatkan omset penjualan. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadahi dan diperlukan pedagang merupakan faktor yang mendorong dalam upaya peningkatan omset penjualan. Fasilitas yang disediakan antara lain fasilitas freezer, kulkas, promosi yang efektif ditempat sasaran, meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan harga jual, memberikan pinjaman modal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan kuisisioner. Analisa data menggunakan likert yaitu metode kualitatif yang diubah menjadi angka. Dari hasil pertanyaan kuisisioner tentang bagaimana manajemen plaza ikan mendorong pedagang ikan untuk meningkatkan omset penjualan. fasilitas freezer, kulkas, promosi yang efektif ditempat sasaran, meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan harga jual,

memberikan pinjaman modal, rata-rata responden menjawab setuju, sehingga ada kerjasama antara pihak manajemen dan pedagang ikan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yang sama yaitu plaza ikan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada tanggal dilaksanakannya penelitian, teknik pengumpulan data penelitian saat ini menggunakan pengumpulan data teknik wawancara dan dokumentasi. Obyek penelitian terdahulu yaitu pedagang ikan asap untuk penelitian saat ini terdapat beberapa obyek yaitu pemerintah Kabupaten Tuban yang diserahkan kepada Dinas Perikanan yang diserahkan kepada UPTD melalui staf organisasi yang telah ditentukan, nelayan pedagang ikan asap pengguna jasa plaza ikan dan nelayan tidak pengguna plaza ikan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu tentang kondisi terhadap plaza ikan Tuban, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada pengembangan plaza ikan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada plaza ikan di Kelurahan Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan tangkap dalam pengembangan plaza ikan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan pada plaza ikan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan tangkap dalam pengembangan plaza ikan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan tangkap yang ada di plaza ikan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban
 - b) Sebagai sarana memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pembangunan di sektor perikanan dalam pembangunan berkelanjutan
 - c) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk seluruh instansi pemerintah daerah khususnya di wilayah Kabupaten Tuban yang berkaitan dengan pengembangan plaza ikan

- b) Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan masukan bagi instansi pemerintah (Dinas Perikanan dan Kelautan) dalam pengembangan program untuk pembangunan wilayah.

